

**SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



OLEH :

ABDUL RASYID

4590020703

**SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENEMPUH UJIAN SARJANA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, yang disebut namanya di bawah ini :

q
Nama : Abdul Rasyid
Nomor Pokok : 4590020703
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Sistem Pembinaan Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi
Selatan

Disetujui untuk ikuti Ujian Skripsi dalam rangka memperoleh gelar sarjana, dengan judul Sistem Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang.

Menyetujui

Pembimbing I



* Drs. M. Rusdi Maidin, SH, M.Si

Pembimbing II



Drs. M. Natsir Tompo, M.Si

Mengesahkan



Drs. H. Húsain Hamka, MS

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu, Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dengan judul: **“Sistem Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan”**.

N a m a : Abdul Rasyid
Nomor Stambuk : 45 90 020 703
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Negara (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara

Pengawas Umum



Prof. DR. H. Abu Hamid, MA
Rektor Univ. 45 Makassar



Dis. H. Husain Hamka, MS.
Plt. Dekan Fisipol

Panitia Ujian



Arief Wicaksono, S. Ip
Wakil Dekan

Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
Ketua Jurusan Ilmu Adm. Negara

Tim Penguji :

1. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
2. Dra. Juharni, M.Si
3. Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si
4. Drs. M. Rusdi Maidin Maidin, SH., M.Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tiada makhluk yang setara dengan Dia. Allah yang memberikan hidayah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana penulis.

Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan ini banyak mengalami tantangan, rintangan karena kemauan yang keras terutama ada beban moral dalam setiap akan menyelesaikan studi yang sudah sekian lama menjadi mahasiswa fisipol "45", serta hanya dorongan dan motivator dari teman-teman dan bantuan dari berbagai pihak sehingga hambatan dan tantangan terutama dari diri sendiri dapat teratasi.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya serta setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs. H. Husain Hamka MS, selaku Dekan Fisipol Universitas "45" Makassar
3. Bapak Drs. M. Rusdi Maidin, SH, M.Si, selaku Pembimbing I
4. Bapak Drs. M. Natsir Tompo, M.Si, selaku Pembimbing II
5. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas "45" Makassar
6. Bapak Pimpinan Lembaga Permsyarakatan Kabupaten Pinrang beserta para stafnya serta Bapak dan Ibu Dosen dalam jajaran Fisipol "45" atas

nasehatnya selama penulis terdaftar menjadi mahasiswa Fisipol "45"

Makassar

Akhirnya Skripsi kupersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta serta istriku dan anakku yang ikhlas mendampingi penulis selama menjadi mahasiswa, serta teman-teman yang terlebih dulu selesai studinya, memberikan semangat hidup untuk menyelesaikan studi pada fisipol Universitas "45" Makassar.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya, untuk itu saran dan kritikan penulis terima dengan hati yang lapang.

Makassar, 6 Mei 2009

Penulis

Abdul Rasyid

DAFTAR TABEL

Tabel III. 01	Klasifikasi Pegawai Menurut Bidang Tugasnya Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	27
Tabel III. 02	Keadaan personil berdasarkan tingkat pendidikan Dan pangkat/golongan.....	28
Tabel III. 03	Keadaan Pegawai dilihat masa kerjanya pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	29
Tabel III. 04	Keadaan Narapidana Berdasarkan Lamanya Hukuman 15 Februari 2009.....	30
Tabel III. 05	Narapidana Menurut Jenis Kelamin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	31
Tabel III. 06	Keadaan Narapidana Menurut Usia Golongan Klasifikasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	32
Tabel III. 07	Jenis Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	33
Tabel IV. 08	Tanggapan Responden Mengenai Adminisi – Orientasi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	36
Tabel IV. 09	Tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	42
Tabel IV. 10	Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Pembinaan Agama Lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	43

Tabel IV. 11	Tanggapan Responden mengenai pelaksanaan pembinaan Kecerdasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	44
Tabel IV. 12	Tanggapan responden mengenai pembinaan pemberantasan Tiga buta di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009	46
Tabel IV. 13	Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Keterampilan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	48
Tabel IV. 14	Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Kesehatan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	50
Tabel IV. 15	Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Rekreasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	52
Tabel IV. 16	Tanggapan responden mengenai kemampuan pegawai dilihat Dari segi Golongan kepangkatan, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	54
Tabel IV. 17	Tanggapan Responden mengenai masa kerja terhadap Kemampuan pegawai dalam pembinaan narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	55
Tabel IV. 18	Tanggapan Responden mengenai pengaruh tingkat pendidikan Formal yang tinggi dalam menunjang tugas pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	57
Tabel IV. 19	Pegawai yang telah mengikuti latihan kursus, dan penataran Pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	59
Tabel IV. 20	Tanggapan Responden mengenai pengaruh pelatihan kursus, dan penataran terhadap kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	60

Tabel IV. 21	Keadaan Sarana Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	62
Tabel IV. 22	Tanggapan Responen mengenai sarana pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	63
Tabel IV. 23	Tanggapan Responden Mengenai Peralatan Pembinaan narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	64
Tabel IV. 24	Tanggapan responden mengenai peralatan yang digunakan Dalam Program pembinaan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang Tahun 2009.....	65

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metodologi	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Sistem	12
B. Pengertian Pembinaan	13
C. Pengertian Narapidana	14
D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	15
E. Dasar Hukum	17
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	20
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Pinrang	20
B. Struktur Organisasi.....	21
C. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang ...	26
D. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang	30

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	34
A. Proses Sistem Pembinaan Narapidana.....	34
B. Program Pembinaan Narapidana.....	40
C. Faktor-faktor yang memperlancar dan pembinaan Narapidana	53
D. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembinaan narapidana....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tugas bangsa Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan kader-kader yang potensial, inovatif, dan berwawasan kenegaraan serta sadar hukum. Terlepas dari itu ternyata lembaga pemasyarakatan bukan sebagai penjara tapi sebuah negara kecil yang punya tanggung jawab dalam mendidik narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan dalam rangka menjawab masalah-masalah yang ada dalam masyarakat justru bukan memberikan pengurangan berbagai bentuk tindakan kriminalitas tapi hadirnya lembaga pemasyarakatan ternyata tidak mampu memberikan nilai yang gemilang dalam rangka menjawab harapan-harapan negara tentunya kalau persoalannya seperti itu, maka lembaga ternyata tidak mampu menghilangkan berbagai bentuk tindakan kriminalitas dalam wacana kebangsaan lalu kalau begitu tentulah menimbulkan berbagai bentuk pertanyaan. Yang harus dijawab dan harus betul-betul relevan dengan perkembangan masyarakat, serta kebutuhan masyarakat seperti apa itu. Apakah masyarakat hanya memikirkan persoalan perut atautkah ia ingin hidup seperti orang lain. Kalau begitu seperti apa penyebab hadirnya narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Pinrang, apakah pola ataukah mekanisme yang lemah dalam pembinaan narapidana, ekonomi atau akidah yang kurang atau pembina di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang yang tidak punya kemampuan dalam membina para narapidana sehingga berkurang tapi malah bertambah.

Hadirnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang tentu ada sebabnya apakah narapidana itu hadir di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang karena unsur pemaksaan ataukah ia hadir karena dijadikan kambing hitam dalam penanganan persoalan yang membutuhkan profesionalisme pelaksanaan hukum dalam masyarakat, terkadang seseorang yang telah mengambil barang orang lain merasa barang itu adalah miliknya. Jadi dewasa ini tingkat kriminalitas sangat berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan ekonomi, maka peran fungsi Lembaga Pemasyarakatan Pinrang dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas dalam masyarakat, dengan mengubah mekanisme sistem yang sifatnya asal-asalan. Marilah kita mencoba melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau ini yang kita resapi dan kita mampu terapkan secara benar maka negara yang kita cintai ini saya pikir akan aman sentosa.

Fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan sangat menentukan dalam pembinaan narapidana narapidana dan sistem yang dianut harus pula tunduk pada peraturan-peraturan perundang-undangan dengan harapan lembaga pemasyarakatan atau pembina akan menjadikan para narapidana sebagai anak didik sebagai kelompok masyarakat yang besar di lembaga pemasyarakatan

dengan satu harapan kepada para pembina Lembaga Pemasyarakatan Pinrang agar mereka diperlukan lebih manusiawi.

Sistem pemasyarakatan sebuah wacana yang terlontar berdasarkan Pancasila yang memandang narapidana sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan juga anggota masyarakat yang perlu diberikan pengayoman dan bimbingan serta fasilitator sebagai aparaturnegara dan pelaksana harian dalam penuntunan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Pinrang haruslah merupakan pembinaan yang benar-benar disesuaikan dengan perkembangan zaman namun sangat disayangkan belum terbentuknya undang-undang yang menentukan fungsi lembaga sehingga masih berpedoman kepada keputusari-keputusan dan surat edaran. Inilah yang merupakan kendala dalam sistem pemasyarakatan sebagai mekanisme yang betul-betul belum terarah karena masih adanya ketergantungan terhadap surat edaran dari atas.

Pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Pinrang merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian khusus sebagai warga negara Indonesia agar kelak setelah kembalinya ke masyarakat dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat memberikan contoh.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang tergantung pelaksanaan harian pembinaan dan tanggung jawab kepada seksi pembinaan narapidana sehingga Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) hanya sebagai penanggung terhadap instansi yang lebih tinggi, dalam hal ini KANWIL yang berada setempat (Propinsi) selaku yang mengontrol lembaga pemasyarakatan.

Untuk menarik suatu rumusan masalah dari topik penelitian di atas, maka perlu dilihat variabel-variabel atau indikator-indikator dari topik penelitian itu sendiri. Dalam hal ini kata yang dijadikan sebagai indikator utama dari keseluruhan topik adalah kata sistem dan pembinaan.

a. Sistem

- Tahap awal
- Tahap menengah untuk kelanjutan
- Tahap akhir

b. Pembinaan

- Pembinaan kepribadian
- Pembinaan keterampilan

Dari beberapa indikator yang telah dirumuskan di atas, apakah sistem pembinaan narapidana bisa berjalan sesuai dengan harapan, tentunya harus

ditunjang sejauhmana komitmen yang dibangun oleh para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan meknisme yang telah ada.

Dari itu penulis membatasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana proses sistim pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang?
2. Bagaimana pembinaan kepribadian keterampilan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Pinrang?
3. Faktor-faktor yang memperlancar dan menghambat pada pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses sistim pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan kepribadian dan keterampilan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Pinrang
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperlancar dan menghambat pada pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi aktual dalam mekanisme sistem pembinaan narapidana menuju masyarakat madani.
- b. Penelitian ini diharapkan memecahkan masalah yang timbul di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan pihak peneliti dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pinrang.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi insan akademis dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Pinrang.
- e. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berminat tentang tema yang sama di Lapas.

D. Kerangka Konseptual

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dimaksudkan sebagai bahagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu dan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi masyarakat dan warga negara yang baik bila dibandingkan kondisi mereka pada saat sebelum memperoleh pembinaan dan bimbingan.

Sejak tahun 1917 di Indonesia diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan aturan hukuman penjatuhan hukuman pidana yang merupakan aturan bagi penjatuhan hukuman perampasan kebebasan bergerak.

Pada tanggal 27 April 1964, lahiriah sistem pemasyarakatan yang merupakan pengganti sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman penjajahan.

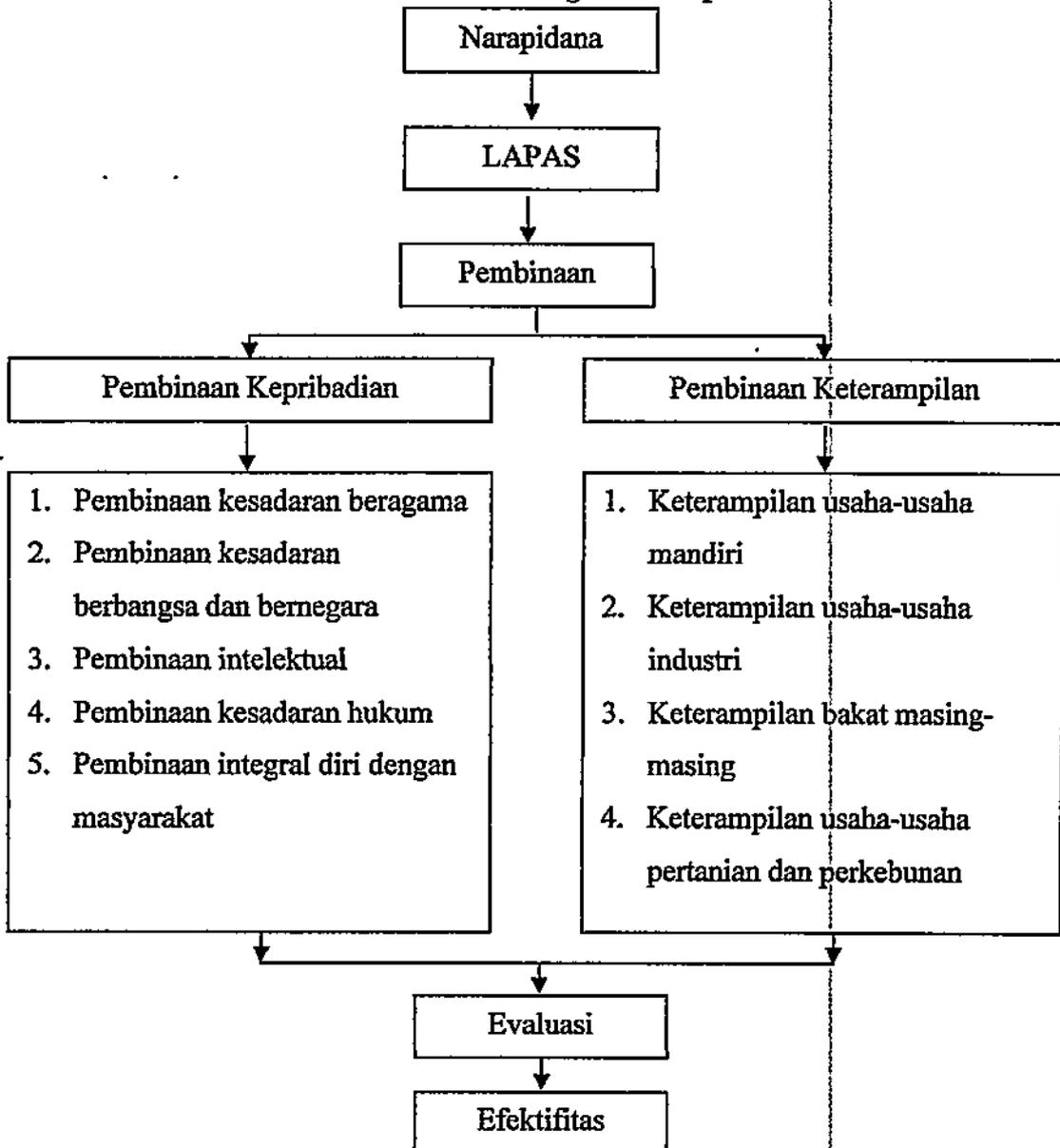
Pada dasarnya arah pembinaan yang diberikan kepada narapidana (warga binaan), adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan yang meliputi:

1. Pembinaan kepribadian yaitu:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian yaitu:
 - a. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri
 - b. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha pertanian dan perkebunan

Dengan demikian pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang diharapkan mampu memberikan nilai positif dan nilai tambah dalam proses pembinaan narapidana agar narapidana setelah kembali ke

tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai tauladan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tidak mudah terjerumus dalam tindakan-tindakan kriminalitas.

Gambar 01 : Kerangka Konseptual



E. Metodologi

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif artinya memberikan gambaran tentang sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang.

b. Dasar penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei dengan maksud untuk mengetahui sampai dimana pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang pada taraf penerapan pembinaan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

Pegawai Lapas : 30 orang

Tahanan Napi : 113 orang

Jadi Populasi : 143 orang

b. Sampel adalah sebagian dari populasi

Teknik penarikan sampel yaitu dengan cara purposive sampling adalah dipilih secara sengaja, dengan pertimbangan bahwa sampel dapat mewakili populasi sebagai berikut:

- Pegawai Lapas	=	10 orang
- Tahanan Napi	=	<u>90 orang</u>
- Sampel	=	100 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi yakni teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung obyek yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara yang dikonfirmasi dengan responden dan informan.
- Angket kuesioner yaitu teknik memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dari responden dengan menyebarkan daftar pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang dilakukan pada responden.

4. Pengolahan Analisa Data

Adapun teknis analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kuantitatif artinya dengan cara presentase dan komentar berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh para pembina yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi dalam lima Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

- Bab I** **Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.**
- Bab II** **Tinjauan Pustaka meliputi: pengertian pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengertian lembaga.**
- Bab III** **Gambaran Umum Lokasi Penelitian meliputi: sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Pinrang, struktur organisasi, keadaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang, Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang.**
- Bab IV** **Pembahasan Hasil Penelitian meliputi: Proses sistem pembinaan narapidana, jenis-jenis pembinaan narapidana, kemampuan personil dalam pembinaan narapidana.**
- Bab V** **Penutup meliputi: kesimpulan dan saran.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Sebelum lanjut ke masalah yang lain terlebih dahulu diuraikan dengan masalah sistem yang dikemukakan oleh Tatang M. Aripin (1985: 10) menyatakan bahwa: Suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang berbentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Ir. Vincent Gaspersz, MS, (1988: 10) dalam buku ensiklopedia administrasi dijelaskan bahwa:

“Sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Misalnya sistem kearsipan perpustakaan. Ini meliputi berbagai prosedur dan metode dalam menggolongkan surat-surat, memberi kode-kode tertentu, menyimpannya dalam berkas, memeliharanya secara tepat, sampai akhirnya mengenai cara-cara penyingkiran dan pemusnahan surat-surat yang tidak dilakukan lagi.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem itu pada umumnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sistem adalah merupakan sehimpunan dari bagian-bagian yang terdiri dari atas sub bahagian yang membentuk struktur.
- b. Bagian/sub sistem itu paling berkaitan dan tidak dapat disimpulkan satu dengan yang lainnya.
- c. Masing-masing bagian/sub sistem bekerja secara mandiri dan bersama-sama

d. Ditetapkan untuk mencapai tujuan secara bersama.

Dengan demikian bahwa sistem ini merupakan suatu unit yang mempunyai bagian-bagian yang saling tergantung dan mempunyai satu tujuan, misalnya tujuan pembinaan narapidana untuk mengendalikan narapidana atau kejahatan yang tidak bertanggung jawab.

B. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu kebulatan kerangka usaha untuk mengembangkan diri secara aktif, atau kegiatan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk menjadikan warga negara yang taat hukum sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa.

Sebagaimana halnya dengan masalah kejahatan yang telah dikemukakan, maka pembinaan perlu dilakukan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang.

Pengertian pembinaan coba ditawarkan oleh Sejoño Soekanto (1994: 20) dalam teorinya adalah: Pembinaan adalah suatu yang mengarah pada suatu tujuan yang dikehendaki, baik dalam pembinaan tingkah laku maupun yang mengarah pada norma-norma yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik.

Pembinaan tersebut di atas merupakan suatu konsepsi tujuan pembinaan karena dalam memberikan pengertian pembinaan langsung pada sasarannya yaitu melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya akhlak perbuatan yang dikehendaki.

Kata pembinaan berasal dari kata bina yang secara etimologisnya berarti: "Pelihara, mengurus, memelihara" Drs. Bambang Marhijanto, (1994:43) yang senada dengan itu dikemukakan pula: "Bina yang berarti pelihara, rawat, bangun. Membina artinya memelihara, merawat, membangun. Drs. I. Hanafi Ridwan, SH dan Lila Maryanti, (1994:45). Selanjutnya kata pembinaan berarti: Proses penilaian yang bersifat bimbingan perbaikan, peningkatan dan pengembangan". M. Sastrapradja, (1981:367). Dengan demikian, secara umum pembinaan dapat diartikan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memelihara, merawat, membangun sesuatu agar menjadi lebih baik, lebih tinggi nilainya serta lebih bagus kondisinya dibandingkan sebelum mengalami proses pembinaan.

C. Pengertian Narapidana

Dalam kehidupan sehari-hari tiap orang adalah individu dari anggota masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Namun di dalam usaha mencapai tujuan hidupnya ada yang berhasil dan sebaliknya dan individu mengalami kesulitan atau kegagalan dalam mencapai tujuan hidupnya.

Narapidana adalah istilah yang diberikan kepada penghuni pemasyarakatan. Saron, (1986:61) dalam lokarkaryanya bimbingan kemasyarakatan mengemukakan bahwa: Narapidana adalah mereka (orang dewasa maupun anak-anak) yang karena melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma kehidupan masyarakat, oleh hakim dipidana ataupun ditindak dan diserahkan kepada pemerintah. Lebih lanjut R. Hartoyo, (1982: 11) mengemukakan, bahwa:

“Narapidana adalah seorang golongan orang yang pada waktu tertentu sedang menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Tujuan hilangnya kemerdekaan adalah untuk melindungi penutupan paksa dan pengasingan dari masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut jelas bahwa dengan demikian narapidana adalah orang-orang atau mereka yang karena melakukan kejahatan menyebabkan hakim memberikan keputusan untuk menempatkan mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan, untuk jangka waktu tertentu dan dibina kembali menjadi manusia yang seutuhnya.

D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga dapat diartikan sebagai wadah atau tempat melakukan aktivitas dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan yang sifatnya terorganisir dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama tapi karena kita berbicara dalam konteks lembaga pemasyarakatan, maka tidak terlepas dari apakah lembaga pemasyarakatan itu, apakah ia hadir dengan sendirinya ataukah ia hadir karena

dihadirkan. Nah kalau ia hadir karena dihadirkan tentunya ada kebutuhan kenapa sampai lembaga ini hadir. Itu yang jadi pertanyaan.

Jadi kalau begitu hadirnya lembaga pemasyarakatan karena ada yang ingin dijawab tentunya adalah adanya berbagai kemudian kriminalitas dalam suatu daerah atau negara, inilah yang kemudian harus dijadikan alasan hadirnya lembaga pemasyarakatan dalam menangani persoalan yang ada dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dikemukakan beberapa pengertian lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, (1986:165) mengemukakan bahwa: Lembaga adalah badan atau organisasi yang melakukan aktivitas atau secara khusus sering digunakan untuk menyebut badan yang menyelesaikan aktivitas pendidikan atau penelitian. Selanjutnya menurut Soerjono, (1986: 1999) mengatakan bahwa: Lembaga adalah bentuk sedangkan pemasyarakatan berarti kebijaksanaan yang mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberikan bekal hidup bagi narapidana setelah kembali masyarakat.

Menurut Muh. Kamal, (1991: 13) mengemukakan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan perintah yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik berupa tindakan kriminal maupun tindakan yang dapat merugikan kehidupan dalam masyarakat.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau badan pembinaan bagi

setiap orang yang melanggar hukum dimasukkan untuk dikembangkan kepribadiannya dengan jalan memberikan pembinaan, pendidikan dan keterampilan dengan kata lain narapidana diingatkan akan adanya norma-norma yang harus dipatuhi dalam proses kehidupan bermasyarakat.

E. Dasar Hukum

Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana, maka dalam melakukan pembinaan tidak dapat dilepaskan dari kaitan tata hukum yang berlaku, bahkan pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pidana. Sebagai bagian dari proses pidana, pelaksanaan pembinaan dan tugas pokok pemasyarakatan lainnya, mempunyai titik tolak landasan sebagai dasar hukumnya.

Adapun dasar hukum tersebut :

1. Pancasila

Sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, pembinaan narapidana diakui mempunyai jiwa dan hidup kejiwaan, manusia terpidana diakui sebagai seorang manusia penuh, bulat, lengkap yang mempunyai jiwa dan juga hak untuk menentukan nasib sendiri dan harga diri.

2. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 berisi bahwa tujuan negara ialah memajukan kesejahteraan, kecerdasan bangsa, dan keadilan

sosial (termasuk tugas pemasyarakatan untuk mendidik dan membimbing narapidana).

b. Pasal-pasal yang berhubungan antara:

- 1) Pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya.
- 3) Pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
- 4) Pasal 30 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- 5) Pasal 31 yaitu tiap-tipa waga negara berhak mendapat pengajaran, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana antara lain:

- a. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (macam-macam pidana).
- b. Pasal 11 Pelaksanaan Hukuman Mati.
- c. Pasal 12 KUHP mengenai lamanya hukuman penjarah.

- d. Pasal 15 mengenai pelepasan bersyarat.
- e. Pasal 18 mengenai lamanya kurungan.
- f. Pasal 20 mengenai terpidana luar jam bebas.
- g. Pasal 24 KUHP mengenai terpidana kurungan dan penjara biasa diwajibkan kerja di luar.
- h. Pasal 25 KUHP mengenai kerja luar tidak akan diberikan terhadap narapidana seumur hidup, wanita, dan orang-orang yang tidak sehat.
- i. Pasal 26 mengenai orang yang mempunyai kedudukan sosial tidak wajib kerja luar.
- j. Pasal 45, 46 dan 47 KUHP untuk anak-anak yang dipidana.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Pinrang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang sebagaimana juga lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia berawal dari sistem kepenjaraan, yaitu suatu cara perlakuan terhadap pelanggaran hukum sebagai peninggalan zaman kolonial Belanda yang menekan pada faktor penjara dan penderitaan dimana pada saat sekarang masih dapat dilihat beberapa bentuk bangunan yang masih mencerminkan keadaan tersebut.

Dengan dicetuskannya tentang ide cara pembinaan para pelanggar hukum di Indonesia oleh DR. Sahardjo pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia Bandung pada tanggal 27 April 1964 telah dihasilkan suatu keputusan komperensi dan keputusan tentang cara-cara pembinaan narapidana atau para pelanggar hukum di Indonesia, yaitu sistem pemasyarakatan dimana dalam sistem pembinaan dilandasi oleh falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu sejak tanggal 27 April 1964 sistem kepenjaraan telah secara resmi diubah menjadi sistem pemsasaran atau sebagai dasar perlakuan pembinaan bagi para pelanggar hukum di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Pinrang terletak di Jalan Abdullah, Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Lembaga Pemasyarakatan

Pinrang bernaung di bawah kantor kehakiman dan hak asasi manusia propinsi Sulawesi Selatan.

Seperti bangunan lainnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dikelilingi oleh tembok setinggi lima meter dalam bentuk segi empat panjang dimana masing-masing sudut terdapat pos penjagaan dan pengawasan, secara umum dari bangunan ada dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran.
2. Bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal penghuni.
3. Bangunan untuk kegiatan pembinaan (ruang pendidikan, ruang perpustakaan, olah raga, kesenian, ibadah dan lain-lain).

Adapun kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang sebanyak 160 orang (seratus enam puluh) dan bila kita amati pada Lembaga Pemasyarakatan Pinrang tidak menutup kemungkinan tahun-tahun yang akan datang kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Pinrang tidak akan mampu menampung para narapidana kalau dilihat dari frekuensi penambahan jumlah setiap tahunnya.

B. Struktur Organisasi

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Bab I Pasal 2 bahwa Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LAPAS) mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan narapidana/ anak

didik, sedangkan dalam Pasal 4 Ayat 1 dinyatakan bahwa klasifikasi LAPAS digolongkan atas 3 Kelas yaitu : 1) LAPAS Kelas 1, 2) LAPAS Kelas IIA dan 3) LAPAS Kelas II B. Sesuai dengan Surat Keputusan di atas menyatakan bahwa LAPAS Pinrang termasuk dalam klasifikasi LAPAS Kelas II B yang dikepalai oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (disingkat KALAPAS).

KALAPAS dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan narapidana/anak didik dibantu oleh staf, baik staf pimpinan maupun staf pelaksana, khususnya dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan narapidana/anak didik dilaksanakan oleh seksi bimbingan napi/anak didik seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ditugaskan bahwa seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberi bimbingan Pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didik .

Sedangkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor M.01.09.05 tahun 1991 tentang Penetapan Uraian Jabatan di Lingkungan Departemen Kehakiman disebutkan bahwa uraian tugas seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja adalah :

1. Menetapkan rencana kerja
2. Melaksanakan administrasi/pencatatan narapidana baru sesuai dengan data yang diterima
3. Mengatur dan mengadministrasikan kunjungan keluarga sesuai dengan prosedur yang berlaku

4. Melaksanakan administasi/pencatatan narapidana yang akan bebas sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Menyiapkan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
6. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan mental/rohani dan bimbingan kerja
7. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tujuan LAPAS dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tugas-tugas melaksanakan bimbingan narapidana/anak didik mempunyai peranan penting.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 44, bagian keempat dinyatakan susunan Organisasi LAPAS Kelas II B, yaitu berdasarkan bagan struktur organisasi (Lampiran) LAPAS Kelas II B Pinrang memiliki unsur-unsur :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dengan dua urusan yaitu : Urusan Umum dan Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- b. Seksi Bimbingan Napi/Anak didik dan kegiatan kerja dengan tiga Sub Seksi yaitu : Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subsidi Perawatan Napi/anak didik serta Subsidi Kegiatan Kerja.
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan tata tertib, dengan dua Sub Seksi yaitu : Subsidi Keamanan dan Subsidi pelaporan dan tata tertib.
- d. Kesatuan pengamanan LAPAS, yang memimpin satuan petugas pengamanan LAPAS.

Adapun tugas masing-masing unsur di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Subag Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian
- b. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- c. Melakukan urusan surat menyurat dan rumah tangga

Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan Pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan Pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak didik.

Sub seksi perawatan narapidana/anak didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja narapidana.

3. Seksi Administrasi, keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan, yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas keamanan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berskala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan serta pembagian tugas keamanan.

Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas keamanan LAPAS. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi satuan organisasi di dalam lingkungan LAPAS, serta dengan instansi lain yang berada di luar LAPAS sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

C. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Dalam melakukan tugas-tugas sebagai supervisor atau pembina ataupun sebagai pelaksana administrasi kantor, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang mempunyai 30 orang pegawai, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut bidang tugasnya

TABEL III. 01
KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT BIDANG TUGASNYA PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pegawai	Prosentase %
1.	Administrasi	20	75
2.	Penjagaan	10	25
	Jumlah	30	100,00

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Melihat tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi pegawai menurut bidang tugasnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang sebanyak 20 orang (75%) sebagai administrasi dan sebanyak 10 orang (25%) sebagai penjaga.

2. Menurut Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

Selanjutnya keadaan personil berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan.

TABEL III. 02
KEADAAN PERSONIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN
PANGKAT/ GOLONGAN

No	Tingkat pendidikan	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Sarjana (S.1)	IV	1 orang
2.	Sarjana (S.1)	III	10 orang
3.	Sarjana muda	III	1 orang
4.	SMA sederajat	II	6 orang
5.	SMA	II	7 orang
6.	SMP sederajat	II	5 orang
	Jumlah		30 orang

Sumber : Papan Potensi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang

Dari tabel tersebut di atas, ternyata di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang, pegawai yang golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 10 orang, Sarjana Muda sebanyak 1 orang dan SMA sederajat sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk pegawai golongan II dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 orang, SMP sederajat sebanyak 5 orang.

3. Masa Kerja Pegawai Lembaga Kemasyarakatan Pinrang

Masa kerja pegawai turut menentukan kecakapan/kemampuan, karena sampai diketahui bahwa lamanya seorang dalam melaksanakan tugas, menjadikan seseorang tentu memiliki pengalaman, keterampilan, aktivitas dan efisiensi sebab selama kurun masa kerja seseorang pegawai telah terjadi proses learning by doing yang cukup represif dalam mendorong dan memotivasi seseorang pegawai dalam peningkatan kecakapan dan kemampuannya. Demikian pula para pegawai yang ada di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang.

Masa kerja yang dijadikan sebagai salah satu faktor penunjang dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang maka masa kerja itu di analisis pada tabel sebagai berikut :

TABEL III. 03
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN MASA KERJA PADA KANTOR LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Masa Kerja	Frekuensi	Prosentase
1.	0 – 5	8	26,6 %
2.	5 – 10	7	23,4 %
3.	10 – 15	6	20 %
4.	15 – 20	6	20 %
5.	20 ke atas	3	10 %
	Jumlah	30	100,00

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Tabel tersebut di atas merupakan pemberian kemampuan pegawai dilihat pada masa kerja, yang dilihat dari kemampuan, maka pegawai pada Kantor Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pinrang dilihat dari masa kerja, yaitu di atas rata-rata berdasarkan lamanya bekerja akan tetapi itu hanya merupakan tataran analisis nasional.

D. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Selanjutnya mengenai keadaan klasifikasi narapidana berdasarkan lamanya hukuman, dapat pula diklasifikasikan atas 4 golongan, yaitu :

1. B I : adalah narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun
2. B II a : adalah narapidana yang hukumannya di vonis 3 bulan sampai 1 tahun
3. B II b : adalah narapidana yang hukumannya di vonis 3 bulan ke bawah
4. B III : adalah narapidana yang hukumannya di vonis kurungan pengganti denda

Adalah keadaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang berdasarkan lamanya dapat hukuman dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL III. 04
KEADAAN NARAPIDANA BERDASARKAN LAMANYA HUKUMAN
15 FEBRUARI 2009

No	Klasifikasi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	B I	79	1	80
2.	B II a	20	1	21
3.	B II b	11	1	11
4.	B III	-	-	-
	Jumlah	110	3	113

Sumber : Dokumen Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pinrang

Berdasarkan data di atas, ternyata bahwa narapidana yang dihukum 1 tahun atau lebih mendominasi populasi yang ada yaitu 80 orang dan yang menarik, ternyata bahwa diantaranya ada 3 narapidana wanita dari beberapa klasifikasi. Sedangkan narapidana yang hukumannya antara 3 bulan sampai 1 tahun sebanyak 21 orang dan merupakan urutan yang kedua. Narapidana yang hukumannya berstatus sebagai kurungan pengganti denda tidak ada sama sekali, dan narapidana yang lama hukumannya 3 bulan 11 orang.

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata bahwa narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang cukup banyak dalam berbagai jenis pelanggaran dan status tahanan. Namun penghuni yang telah memperoleh vonis hukuman dari hakim lebih banyak dibandingkan dengan penghuni yang masih berstatus tahanan belaka.

TABEL III. 05
NARAPIDANA MENURUT JENIS KELAMIN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Klasifikasi	Narapidana (orang)
1.	Laki-laki	110
2.	Perempuan	3
	Jumlah	113

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Dari tabel tersebut di atas bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dengan penghuni 113 orang dengan 110 orang laki-laki, dan perempuan 3 orang.

Selain dibedakan menurut jenis kelamin, juga dapat dilihat keadaan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dibagi dalam empat golongan yaitu ; dewasa 27 tahun ke atas, dewasa muda 21-26 tahun, remaja usia 16-20 tahun, dan anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Yang rinci pada tabel berikut :

TABEL III. 06
KEADAAN NARAPIDANA MENURUT GOLONGAN KLASIFIKASI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Golongan usia	Jumlah Napi	Prosentase
1.	Dewasa	62	55,2 %
2.	Dewasa Muda	35	37,3 %
3.	Remaja	10	11,2 %
4.	Anak-anak	6	6,3 %
	Jumlah	113	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa usia dewasa 62 orang atau (55,2 %), dewasa muda 35 orang (37,3 %) sedangkan remaja 10 orang atau (11,2 %), sedangkan anak-anak 6 orang (6,3 %) sehingga untuk melakukan pembinaan perlu pendekatan individual yang bersifat menyadarkan.

Narapidana dan tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pinrang berjumlah 113 orang yang terdiri dari 110 orang pria dan 3 orang wanita, yang berdasarkan klasifikasi jenis pelanggarannya.

Klasifikasi narapidana berdasarkan jenis pelanggaran yang terbanyak adalah pencurian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL III. 07
JENIS KEJAHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Jenis kejahatan	Jumlah napi	Prosentase (%)
1.	Pembunuh	14	13,40
2.	Penganiayaan	30	29,13
3.	Pencurian	50	48,54
4.	Kesusilaan	4	3,04
5.	Penipuan	5	0,10
6.	Lalu lintas	4	3,84
7.	Korupsi	4	1,94
8.	Penculikan	2	1,94
	Jumlah	113	100,00

Sumber : Dokumentasi pada Lembaga Pemasyarakatan Pinrang

Dengan demikian narapidana dan tahanan yang terlibat dalam kasus pembunuhan sebanyak 14 orang pria sedangkan dalam kasus pencurian sebanyak 50 orang. Kasus penganiayaan sebanyak 30 orang, kasus kesusilaan sebanyak 4 orang, kasus penipuan sebanyak 5 orang, kasus lalu lintas sebanyak 4 orang, kasus korupsi sebanyak 4 orang dan kasus penculikan sebanyak 2 orang.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Sistem Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang, merupakan proses integrasi kehidupan antar mereka dan harus aktif secara positif bekerjasama secara timbal balik atau gotong royong sesama mereka untuk mencapai perkembangan integrasi kearah yang lebih sempurna.

Sebagai suatu proses pembinaan diperlukan suatu proses berlangsungnya masa pidana oleh narapidana mulai diterima di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat membawa proses perubahan kearah kebaikan, yang pelaksanaannya dimulai dari proses dalam lingkup kebaikan, yang pelaksanaannya dimulai dari proses dalam lingkup tembok atau lebih dikenal di dalam sistem Pemasyarakatan dimulai dengan periode penanganan sampai dengan kemandirian berkarya narapidana.

Periode pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berlangsung dalam waktu singkat dalam artian sesuai masa pidana dan perkembangan terpidana itu sendiri menuju periode di luar tembok.

Karena Pemasyarakatan sebagai suatu proses yang berlaku secara evolusi, maka proses ini disalurkan tahap demi tahap.

Tahap-tahap tersebut harus dilalui dengan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dan berlaku secara umum sebagai berikut :

1. Admisi Orientasi

Admisi yaitu penerimaan pertama dilembaga Pemasyarakatan dari terpidana pertama kalinya melanggar hukum. Sedangkan orientasi adalah sebagai pengenalan pertama dengan lingkungan hidup dimana terpidana yang bersangkutan akan menjalankan sebagian dari hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan.

Selama masa admisi-orientasi yang berlangsung kurang lebih satu bulan harus diusahakan supaya terpidana memperoleh pengetahuan yang jelas tentang kehidupan, dan tentang kemungkinan-kemungkinan dan harapan-harapan yang tersedia dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu narapidana menemukan kembali jalan yang benar menuju kehidupan dunia bebas.

Untuk keperluan admisi orientasi ini terpidana ditempatkan dalam satu bangunan khusus (kamar) yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan program-program khusus bagi keperluan admisi-orientasi, antara lain ruang interview alat alat observasi.

Masa berlangsungnya admisi orientasi terpidana sesuai dengan tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

2. Penentuan Orientasi Permulaan Melalui Sidang

Yang menentukan permulaan ialah DPD (Dewan Pembinaan Pemasarakatan) dimana anggota-anggotanya terdiri dari salah seorang staf pimpinan dan pembantu Kepala Lembaga Pemasarakatan yang mengepalai pelaksanaan program-program diberbagai bidang anggota.

Berdasarkan pertimbangan atas pendapat-pendapat yang tercantum dalam risalah admisi-orientasi ditentukan program pembinaan bagi terpidana yang bersangkutan serta menentukan kapan akan diadakan sidang untuk meninjau hasil pelaksanaan (dalam hal ini bertindak sebagai pembicara adalah walinya).

Keputusan pembinaan Pemasarakatan antara lain penempatan serta penutupan (maksimum, medium atau mini sekuriti), dimana dipekerjakan, bagaimana pendidikan mental sosial dan keterampilan narapidana serta hal-hal yang perlu diputuskan dalam sidang guna penentuan program pembinaan narapidana.

3. Pelaksanaan Program Permulaan

Maksud dari Program Permulaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang agar para narapidana diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lembaga dengan penuh kesadaran menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan maksud program permulaan yang dikemukakan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang, bahwa tujuan program permulaan adalah :

- a. Untuk menanamkan perasaan saling mengerti, toleransi, turut bertanggung jawab dan tidak menutup pintu terhadap kembalinya narapidana ditengah masyarakat.
- b. Mengusahakan agar terpidana menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan salah
- c. Mengusahakan agar supaya yang dia peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan melalui usaha pembinaan dan dapat dijadikan bekal apabila ia kembali kemasyarakat.

Tiap supervisor dari unsur pembinaan narapidana yang ditempatkan dibawa pengawasannya dan diwajibkan mengevaluasi terhadap tiap-tiap terpidana dalam urusan masing-masing bilamana telah berjalan kurang lebih sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya menurut (Budi Sarjono, 15 Februari 2009) Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat dicapai kemajuan dalam proses, antara lain cukup intensif dan telah menunjukkan perbaikan dalam kelakuan narapidana, kecakapan dan lain-lain.

4. Penentuan Program-Program Selanjutnya Melalui Sidang Lanjutan

Penentuan program pembinaan selanjutnya bagi narapidana adalah tingkat kegunaan pembinaan yang telah dilakukan didasarkan atas kondisi dan keadaan narapidana yang bersangkutan dan kemudian ditetapkan berdasarkan program atau sidang sebelumnya.

5. Penentuan Program Transisi Menjelang Pembinaan Institusiar Melalui Sidang

Sebelum ditentukan program transisi maka harus melalui program-program asimilasi yaitu setelah kurang dari dari separuh masa pidananya seperti mengikuti pada masalah-masalah umum, bekerja pada swasta dan lain-lainnya, cuti pulang yang mana masih diperlukan pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga selanjutnya dalam penentuan program transisi harus melalui sidang yang lebih dahulu mengadakan evaluasi terhadap usaha asimilasi tersebut guna mengukur kemajuan pembinaan.

6. Pelaksanaan dan evaluasi program pada prinsipnya sama dengan program permulaan terpidana diberi tanggung jawab yang lebih besar, lebih-lebih tanggung jawab dan masyarakat luar, dipupuk rasa harga diri dan tata krama untuk selanjutnya dan masa pidananya diadakan evaluasi oleh sidang.

7. Pelaksanaan program transisi menjelang pembinaan kelembagaan dan evaluasinya, berdasarkan program-program selanjutnya, usaha asimilasi tersebut narapidana dapat memperoleh cuti, bekerja pada perusahaan mengikuti pendidikan atau cuti menjelang lepas mutlak, bilamana berhasil ditingkatkan pembinaannya.

Dari tahap tersebut di atas merupakan proses pembinaan narapidana, namun pula diuraikan tahap pembinaan sebagai berikut :

1. Tahap pertama (sejak diterima di Lembaga Pemasyarakatan, satu pertiga masa pidananya)
2. Tahap kedua (seperdua masa pidananya)

3. Tahap Ketiga (sepertiga masa pidananya)
4. Tahap Keempat (seperempat masa pidananya)

Tahap pertama merupakan tahapan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga merupakan tahapan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang bentuknya diperkerjakan diluar lembaga misalnya pada lembaga terbuka (usaha pertanian, peternakan, pengeraman dan sebagainya)

Tahap keempat adalah tahap integrasi berupa pelepasan bersyarat, yang tidak lagi dalam pengawasan lembaga dalam Pemasyarakatan, narapidana tidak lagi kembali dalam Lembaga Pemasyarakatan namun berada pada bimbingan dan pengawasan oleh petugas Balai Bispa sesuai dengan keputusan pelepasan bersyarat, namun jika hal itu dianggap perlu.

Bimbingan dan pengawasan dilakukan oleh petugas Balai Bispa dipenuhi syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan pelepasan persyaratan, dan bila percobaan berakhir bimbingan dapat diteruskan oleh petugas Balai Bispa atas permintaan dari narapidana yang bersangkutan.

B. Program Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana sesuai dengan tahap-tahap pembinaan yang ditetapkan berdasarkan sidang pada pelaksana program dan evaluasinya, jenis dan program pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jenis pembinaan yang dilakukan yang dimulai dari fase admisi-orientasi program pembinaan narapidana yang bersangkutan.

Jenis pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan mental dan kecerdasan, yang menyangkut

a. Pembinaan kesadaran yang beragama

Usaha ini dilakukan untuk memperteguh keimanan peserta pembinaan terutama memberikan pengertian agar warga binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT

1) Pembinaan Agama Islam

Dalam melakukan program pembinaan agama Islam sesuai hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berupa, pelajaran mengaji, berwudhu, shalat, ceramah agama, dan diskusi agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan keagamaan khusus pembinaan keagamaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang ditetapkan jadwal dalam pelaksanaannya yaitu dilaksanakan dua kali seminggu yaitu hari Selasa dan Kamis sore untuk pelajaran agama dan ceramah agama Islam hari Jumat dan bulan puasa. Pelaksanaan program pembinaan agama Islam ini dinilai reponden sebagai berikut :

TABEL IV. 09
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEMBINAAN
AGAMA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	43	43
2.	Lancar	52	52
3.	Kurang lancar	25	5
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas merupakan penilaian atau keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yang memberikan nilai 43 orang (43 %) pelaksanaannya sangat lancar dan 52 orang (52 %) dan 5 orang (5 %) kurang lancar.

2) Pembinaan Agama lain

Bagi yang beragama lain, maka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dilaksanakan pembinaan agama yang terdiri dari agama Protestan dan Katolik maupun agama, melaksanakan kebaktian dalam Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan kesadaran dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai tanggapan responden sebagai berikut :

TABEL IV. 10
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN
PEMBINAAN AGAMA LAIN DI LP KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	37	37
2.	Lancar	42	42
3.	Kurang lancar	18	18
4.	Tidak lancar	3	3
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas merupakan penilaian atau keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan agama lain bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yang bernilai lancar 42 orang (42 %) dan yang menilai kurang lancar 18 orang yang tidak lancar 3 orang (3 %)

3) Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan narapidana dari segi pengetahuannya. Pembinaan kecerdasan pada aspek intelektual agar pengetahuan dan kemampuan aspek intelektual dan berpikir narapidana bisa semakin meningkat dan dipertajam sehingga mampu untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, konstruktif selama mereka berada dalam masa pembinaan.

Pembinaan aspek intelektual, dilakukan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pelaksanaan

melalui pendidikan formal, mengikuti ketentuan yang ada. Biasanya didatangkan guru-guru sekolah serta dibantu oleh para pembina yang terdiri dari staf Lembaga Pemasarakatan Pinrang.

Pembinaan dalam hal pendidikan non formal dilaksanakan melalui cara-cara yang paling mudah dan paling murah seperti kegiatan ceramah-ceramah umum, membuka kesempatan yang seluas-luasnya agar memperoleh informasi dari luar lingkungan Lembaga Pemasarakatan, misalnya membaca koran dan majalah, menonton televisi, mendengarkan siaran radio, membaca diperpustakaan, serta diadakan program belajar kejar Paket A dan Paket B, yang dapat dinilai responden sebagai berikut :

TABEL IV. 11
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEMBINAAN
KECERDASAN DI LP KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	52	52
2.	Lancar	33	33
3.	Kurang lancar	12	12
4.	Tidak lancar	3	3
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian responden mengenai kegiatan pembinaan kecerdasan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang dan yang menilai sangat lancar 52 orang (52 %),

yang menilai lancar 33 orang (33 %), yang menilai kurang lancar 12 orang (12 %) serta tidak lancar 3 orang (3 %).

Menurut Kepala LAPAS Pinrang (Budi Sarjono, 15 Februari 2009) menyatakan bahwa program pendidikan dalam rangka pembinaan intelektual ada tiga pemberantasan buta yaitu :

1. Buta Bahasa Indonesia artinya bahwa para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang masih banyak yang memang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik, sehingga diberikan semacam pembelajaran percakapan dalam Bahasa Indonesia yang benar, dua kali dalam satu minggu.
2. Buta huruf artinya bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang pada sebagian tidak mampu membaca dan menulis, pelatihan dilakukan 2 kali dalam satu minggu.
3. Buta angka artinya bahwa narapidana yang tidak mengenal angka akan diberikan semacam pembelajaran, 2 kali dalam satu minggu (Senin, Sabtu)

Sementara pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum serta pembinaan integral diri dengan masyarakat diberikan dalam bentuk ceramah dan waktunya temporer (wawancara KALAPAS Pinrang, 14 Februari 2009, Jam 10.00)

Di bawah ini penilaian responden terhadap kegiatan pemberantasan tiga buta sebagai berikut :

TABEL IV. 12
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEMBINAAN
PEMBERANTASN TIGA BUTA DI LP KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Keterangan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	43	43
2.	Lancar	45	45
3.	Kurang lancar	10	10
4.	Tidak lancar	2	2
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian responden mengenai kegiatan pembinaan pemberantasan tiga buta pada Lembaga Pemberantasan Kelas II B Pinrang dengan menilai sangat lancar 43 orang (43 %) dan yang menilai lancar 45 orang (45 %) dan yang menilai kurang lancar 10 orang (10 %) dan yang menilai tidak lancar 2 orang (2 %)

2. Program Pembinaan Keterampilan

Program pembinaan keterampilan yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang selain bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, juga tidak kalah penting sebagai bekal setelah menjalani masa pidananya, maka para narapidana dapat melakukan pekerjaan berdasarkan keterampilan yang diperolehnya di Lembaga Pemasyarakatan untuk kemudian diaplikasikan di masyarakat.

Pelaksanaan program pembinaan keterampilan bagi narapidana dilakukan sesuai dengan bakat dan keinginannya, menurut Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja (Mustahid Achmad, 20 Februari 2009) adapun jenis-jenis pembinaan keterampilan sebagai berikut :

a. Anyaman Rotan

Kegiatan ini merupakan pembuatan anyaman rotan kursi dan dalam melaksanakan tugas pembinaan keterampilan yang dilakukan atas kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk penyediaan peralatan dan pelatih, sedangkan dari Lembaga Pemasyarakatan menyediakan tempat serta narapidana yang akan dilatih, hasil dari latihan keterampilan maka oleh pihak swasta dijual kepada masyarakat, dan hasil dari penjualan terjadi bagi hasil antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak swasta maupun narapidana sebagai upaya dilakukan sesuai dengan penyajian yaitu 5 % (Lima persen).

b. Pembuatan Kompor

Pembuatan kompor di samping sebagai sarana untuk latihan keterampilan juga sebagai sarana produksi, kompor yang dibuat adalah kompor minyak tanah dan bahan baku adalah drum aspal.

Hasil latihan dapat dijual kepada masyarakat, sedangkan narapidana yang ikut latihan juga memperoleh upah yang besarnya yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan perjanjian atau kesepakatan.

c. Penjahitan

Salah satu bentuk keterampilan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang adalah bidang penjahitan dan dibina langsung oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Hasil dari penjahitan itu dijual pada masyarakat dan upah yang diberikan kepada narapidana ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pertukangan Kayu

Untuk bidang pertukangan kayu, maka di samping sebagai sarana latihan juga dari hasilnya berupa peralatan rumah tangga dapat dijual kepada masyarakat, dengan pelaksanaannya atas kerja sama dengan koperasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pinrang.

TABEL IV. 13
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEGIATAN PEMBINAAN
KETERAMPILAN NAPI DI LP KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	49	49
2.	Lancar	46	46
3.	Kurang lancar	4	4
4.	Tidak lancar	1	1
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan program pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang menilai sangat lancar 49 orang (49 %) dan yang menilai kurang lancar

4 orang (4 %) sedangkan tidak lancar 1 orang (1 %) sehingga penilaian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang adalah aktif.

3. Pembinaan Kesehatan

Pembinaan kesehatan merupakan faktor terpenting bagi manusia untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat termasuk narapidana yang hidup dalam lingkungan terbatas. Olehnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang melaksanakan program pembinaan kesehatan narapidana untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan timbulnya penyakit, dengan kegiatan : Kesegaran Jasmani, Kebersihan Lingkungan, Pemeriksaan Kesehatan, dan Kebersihan kamar, pakaian, dan lain-lain.

Dengan pelaksanaan program pembinaan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yang menyatakan bahwa program pembinaan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan penyakit malaria, sehingga diwajibkan bagi napi melakukan program kesehatan (wawancara dengan Kalapas) Budi Sarjono, 15 Febuari 2009).

Selain hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV. 14
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEGIATAN PEMBINAAN
KECERDASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	48	48
2.	Lancar	37	37
3.	Kurang lancar	12	12
4.	Tidak lancar	3	3
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian responden mengenai kegiatan program pembinaan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dan yang memberikan penilaian sangat baik 48 orang (48 %) dan yang memberikan penilaian baik 37 orang (37 %) sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik 12 orang (12 %) dan yang memberikan tanggapan tidak baik 3 orang (3 %).

4. Pembinaan Rekreasi

Salah satu pembinaan rehabilitasi dan pengembangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dilakukannya pembinaan rekreasi dengan tujuan untuk menghibur, menghilangkan pikiran-pikiran negatif, dan ketegangan sosial bagi narapidana secara berangsur dapat dihilangkan, sehingga mereka tenang dan terhibur untuk menyadari dan bertolak belakang perbuatan negatif.

Untuk pembinaan aktivitas bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang sekalipun keterbatasan sarana yang menunjang, akan tetapi dapat juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : (wawancara Kepala Sub Seksi Perawatan Mustafa, S. Pd, 20 Februari 2009)

- a. Kegiatan olah raga yang dilaksanakan dua kali seminggu yaitu hari Jun'mat dan hari Minggu, yang meliputi : Bola Volly, Catur, Tennis Meja, Sepak Takrow dan Bulu Tangkis.
- b. Kesenian yang dilaksanakan dua kali seminggu yaitu Jum'at dan Minggu.

Pelaksanaan program pembinaan rekreasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang kegiatan hanya diwujudkan dalam kegiatan olah raga, kesenian dan membaca buku dipersustakaan lembaga. Hal ini perlu dipahani bahwa pemberian rekreasi ini berbeda dengan pembinaan masyarakat yang sering dilakukan, yaitu kegiatan piknik dan membaca ini tidak dilaksanakan karena mempunyai resiko sehingga ditiadakan.

Pelaksanaan program pembinaan rekreasi bagi narapidana sesuai dengan kegiatan tersebut di atas dinilai pelaksanaanya oleh responden sebagai berikut:

C. Faktor-faktor yang memperlancar dan pembinaan narapidana

1. Faktor Masa Kerja

Salah satu cara dalam mencapai tujuan Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan napi adalah harus ditunjang dengan kemampuan pegawai yang ada, baik yang bertugas dibidang administrasi maupun pada penjagaan. Pelaksanaan yang baik adalah merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan tugas-tugas karena mereka subjek dalam setiap aktivitas yang menjadi tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang.

Pegawailah yang merupakan pelaku adalah penggerak seluruh proses mekanisme dalam sistem pelaksanaan tugas-tugas operasional. Oleh karena itu agar mekanisme pelaksanaan tugas khususnya dalam sistem pembinaan napi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan, maka semua pegawai harus mempunyai predikat yang baik. Pegawai yang baik disini diartikan memiliki kecakapan, kemampuan yang tinggi dalam melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Disamping sulitnya menentukan tingkat kemampuan dari masing-masing individu pegawai Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya kemampuan dalam bidang pembinaan narapidana, maka terdapat indikator pada kemampuan formal yang disandang oleh penggolongan pegawai, indikator kemampuan pegawai hanya didasarkan pada data formal yang ada pada sub bagian pegawai kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yang didokumentasikan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan personil untuk menunjang proses pembinaan narapidana. Menilai kecakapan/kemampuan pegawai di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang ialah kepangkatan pegawai, dengan melihat pendidikan dan latihan formal pegawai.

Indikator tersebut di atas merupakan indikator yang dijadikan kriteria umum pegawai lembaga terutama dalam menilai kecakapan, kemampuan, promosi pada suatu jabatan atau penugasan.

Pada tabel di bawah ini memperlihatkan tanggapan responden mengenai kemampuan pegawai dalam melakukan dan menunjang narapidana sesuai dengan golongan dan kepangkatan sebagai berikut :

TABEL IV. 16
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEMAMPUAN PEGAWAI DILIHAT DARI SEGI GOLONGAN KEPANGKATAN, PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat mampu	20	20
2.	Mampu	45	45
3.	Cukup mampu	31	31
4.	Tidak mampu	4	4
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai kemampuan seorang pegawai dilihat dari golongan kepangkatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dimana yang

memberikan sangat mampu 20 orang (20 %), sedangkan yang memberikan nilai mampu 45 orang (45 %) sedangkan yang memberikan tanggapan cukup mampu 31 orang (31 %), yang memberikan tanggapan tidak mampu 4 orang (4 %).

Dari gambaran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pegawai dengan memakai tolok ukur pangkat golongan adalah menunjang proses pembinaan dan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang.

Sesuai dengan praktek atau pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam pembinaan narapidana sesuai dengan masa kerja, dapat dilihat pada responden sebagai berikut :

TABEL IV. 17
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI MASA KERJA TERHADAP KEMAMPUAN
PEGAWAI DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	35	35
2.	Berpengaruh	37	37
3.	Cukup berpengaruh	25	25
4.	Tidak berpengaruh	3	3
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masa kerja dari pegawai Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang sesuai dengan penilai responden, yaitu 35 orang (35 %) yang mengatakan berpengaruh

37 orang (37 %) atau cukup berpengaruh 25 orang (25 %), dan yang menilai tidak berpengaruh 3 orang (3 %). Pada penilaian tersebut, maka masa kerja pegawai pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang berpengaruh pada pelaksanaan tugas tersebut dalam pembinaan narapidana.

2. Faktor Pendidikan Pegawai

a. Latar belakang formal

Latar belakang pendidikan formal pegawai pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yang dijadikan sebagai indikator kemampuan menunjang sistem pembinaan narapidana. Secara teoritis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang pegawai maka semakin tinggi tingkat kemampuannya dan keahliannya.

Secara teoritis bahwa kemampuan pegawai pada kantor Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang aktifitas narapidana adalah dengan menilai tolok ukur tingkat pendidikan formal yang dimiliki setiap pegawai. Hal ini dapat dilihat keterangan responden mengenai tingkat pengaruh pendidikan formal yang tinggi terhadap kemampuan pelaksanaan tugas pegawai pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang, pada tabel di bawah ini

TABEL IV. 18
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENGARUH
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL YANG TINGGI DALAM MENUNJANG
TUGAS PEGAWAI LP KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	51	51
2.	Berpengaruh	23	23
3.	Cukup berpengaruh	20	20
4.	Tidak berpengaruh	6	6
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan singkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan penilaian responden, yaitu sangat berpengaruh 51 orang atau (51 %) dan yang menilai berpengaruh 23 orang (23 %) sedangkan yang menilai cukup berpengaruh 20 orang (20 %) sedangkan yang menilai tidak berpengaruh 6 orang (6 %) sehingga penilaian responden menunjukkan makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Dari tanggapan tersebut maka kemampuan pegawai dalam menunjang kemampuan dalam proses pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan adalah amat berpengaruh atau sangat menunjang program pembinaan.

b. Pendidikan Non Formal

Disadari bahwa pegawai yang bermodalkan pendidikan formal dari berbagai jenjang pendidikan ternyata belum dapat dijadikan suatu jaminan bahwa yang bersangkutan mampu mengembangkan tugas yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu masih diperlukan banyak pengetahuan tertentu berupa latihan/kursus penataran guna menambah pengetahuan keterampilan serta cakrawala pandang terhadap ruang lingkup tugas pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan dan terutama pada pelaksanaan tugas-tugas yang diemban pada setiap pegawai.

Dari keseluruhan pegawai pada kantor Lembaga Pemasyarakatan yang populasinya berjumlah 30 orang, dimana dalam pelaksanaan tugas-tugas telah diberikan latihan formal, baik untuk promosi jabatan maupun latihan untuk bidang teknis maupun operasional pembinaan, dimana sesuai dengan data yang didokumentasikan dan terlihat pegawai yang telah mengikuti latihan, kursus dan penataran seperti pada tabel berikut :

TABEL IV. 19
PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI LATIHAN DAN PENATARAN
PADA KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Jenis Latihan	Jumlah (org)	Keterangan
1.	Penataran	3	Dua angk.
2.	Latihan menembak	4	Dua angk.
3.	Latihan beladiri	7	Sewa pegawai
4.	Kursus menjahit	1	
5.	Kursus perkayuan	2	
6.	Kursus las	1	
7.	Latihan dasar	5	Tiga angk.
8.	Pemasyarakatan	3	Satu angk.
9.	Sepadya	4	
	Jumlah	30	

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang

Peningkatan kemampuan pegawai dalam melakukan tugas yang akan dilakukan berbagai jenis latihan, baik latihan yang bersifat menunjang maupun latihan untuk persiapan promosi jabatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang, yang secara yuridis dapat meningkatkan kemampuan pegawai. Hal itu dapat dilihat pendapat responden sebagai berikut :

TABEL IV. 20
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENGARUH PELATIHAN
KURSUS, DAN PENATARAN TERHADAP KEMAMPUAN PEGAWAI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	42	42
2.	Berpengaruh	40	40
3.	Cukup berpengaruh	16	16
4.	Tidak berpengaruh	2	2
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2009

Tabel tersebut di atas menguraikan penilaian responden mengenai pengaruh pelatihan terhadap kemampuan pegawai dalam menunjang proses pembinaan narapidana dan pelaksana tugas pegawai dalam menunjang proses pembinaan narapidana dan pelaksana tugas pegawai pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang. Hal itu 42 orang (42 %) yang sangat berpengaruh, 40 orang (40 %) yang memberikan penilaian berpengaruh, 16 orang (16 %) yang memberikan penilaian cukup berpengaruh, dan tidak berpengaruh 2 orang (2 %).

Dari penilaian tersebut dengan adanya pelatihan-pelatihan/kursus-kursus, dan penataran yang telah diikuti oleh pegawai dapat meningkatkan atau sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pembinaan narapidana.

D. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembinaan narapidana

1. Sarana Pembinaan

Dalam melaksanakan berbagai program pembinaan narapidana pada Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pinrang sesuai dengan pengamatan objek menunjukkan bahwa untuk melakukan pembinaan telah disediakan sarana, baik sarana yang bersifat khusus maupun sarana yang bersifat umum.

Sarana yang bersifat umum yaitu sarana yang diperuntukkan pada pelaksanaan program pembinaan umum seperti pemberian penyuluhan, ceramah, dan lainnya yang bersifat umum dan publikasi kepada semua narapidana tanpa kecuali, sedangkan untuk sarana yang bersifat khusus yaitu sarana yang diperuntukkan bagi kegiatan latihan, kursus dan keterampilan narapidana.

Adapun keadaan sarana pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat tabel sebagai berikut :

TABEL IV. 21
KEADAAN SARANA PEMBINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kapasitas	Ket
1.	Aulah	-		
2.	Musyallah	1	100 orang	
3.	Perpustakaan	1	20 orang	
4.	Tempat pengobatan	-	-	
5.	Tuang pertukangan kayu	1	10 orang	
6.	Ruang jahitan	1	50 orang	
7.	Perbengkelan	1	5 orang	
8.	Lokasi pertanian			
9.	Lokasi pembuatan Pembuatan kapur			
10.	Loksi pembuatan Batu bara			

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang, Tahun 2009

Pada uraian tabel tersebut di atas merupakan wadah sarana bagi pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yaitu terdiri dari sarana ibadah satu buah, perpustakaan sarana pertukangan, penjahitan, perbekalan.

Dari keadaan sarana sesuai dengan pendapat responden dapat dinilai pada tabel sebagai berikut :

TABEL IV. 22
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SARANA PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat menunjang	5	5
2.	Menunjang	10	10
3.	Cukup menunjang	35	35
4.	Tidak menunjang	50	50
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2009

Dari keadaan sarana pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Sarana pembinaan dalam tembok telah dinilai dari responden menyatakan yaitu 5 orang (5 %) menilai sangat menunjang 10 orang (10 %) menilai menunjang 35 orang (35 %) menilai cukup menunjang program pembinaan, dan tidak menunjang mengatakan sebanyak 50 orang (50 %) dari gambaran penilaian ini dapat dikatakan bahwa sarana yang tersedia pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang hanya cukup menunjang bahkan 50 % yang menyatakan tidak menunjang.

2. Sarana

Peralatan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala alat yang digunakan dalam pembinaan narapidana baik untuk pembinaan keterampilan maupun untuk jenis pembinaan lainnya, seperti alat kesehatan, buku bacaan dan lain-lainnya yang digunakan.

Keadaan peralatan untuk pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dapat dilihat tabel berikut ini :

TABEL IV. 23
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERALATAN PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PINRANG
TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Amat lengkap		
2.	Lengkap	40	40
3.	Cukup lengkap	40	40
4.	Tidak lengkap	20	20
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2009

Tabel tersebut di atas, adalah pernyataan responden mengenai peralatan yang digunakan dalam pembinaan narapidana, yang menilai tidak lengkap 20 orang (20 %) dan yang menilai cukup lengkap 40 orang (40 %) dan yang menilai lengkap 40 orang (40 %).

Namun dengan keterbatasan peralatan juga tetap menunjang proses pembinaan sesuai dengan hasil penilaian responden sebagai berikut :

TABEL IV. 24
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERALATAN
YANG DIGUNAKAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN NAPI
DI LP KELAS II B PINRANG TAHUN 2009

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat menunjang	10	10
2.	Menunjang	35	35
3.	Cukup menunjang	34	34
4.	Tidak menunjang	21	21
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2009

Dari tabel di atas tanggapan responden mengenai alat yang digunakan dalam aktifitas pembinaan napi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang dan yang menilai sangat menunjang 10 orang (10 %), dan yang menilai cukup menunjang 34 orang (34 %) dan yang menilai tidak menunjang 21 orang (21 %) sehingga dari gambaran penilaian tersebut masih sangat jauh sesuai dengan harapan dalam menunjang pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pinrang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat persoalan pada pembahasan sistem pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang, maka penulis menyimpulkan pada pola pembinaan narapidana, jenis pembinaan, kemampuan personil, dan keadaan sarana dan fasilitas pembinaan yang mendukung program pembinaan yang coba dipetakan dalam berbagai persoalan sebagai berikut:

1. Proses dan program pembinaan narapidana yang dimulai dari proses admisi orientasi untuk menentukan program yang harus dilakukan setiap narapidana mulai dari sidang, dimana pelaksanaan sesuai dengan jawaban-jawaban responden yang cenderung menanggulangi dengan sangat respon.
2. Jenis-jenis pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang yang terbagi dalam dua pola pemetaan yaitu : Pembinaan kecerdasan/intelektual dan Pembinaan keterampilan.

Yang dinilai responden dengan sangat positif dalam rangka mengarahkan narapidana serta kemampuan personil pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang dalam melaksanakan tugas pembinaan dinilai responden sangat berpengaruh

3. Sarana dan fasilitas sebagai faktor pendukung dan menghambat di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang belum cukup dan belum memadai dalam membina para narapidana.

B. Saran-saran

- a. Harapan penulis semoga pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang lebih ditingkatkan dalam rangka membimbing para napi agar lebih berperan aktif dalam masyarakat setelah keluar dari pemasyarakatan.
- b. Sekiranya para personil Lembaga Pemasyarakatan yang dianggap belum layak untuk membina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang agar diberikan pelatihan dan pendidikan, guna menunjang pembinaan di lembaga tersebut.
- c. Kiranya fasilitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pinrang agar diupayakan kelengkapannya dengan memanfaatkan hasil penjualan hasil produksi keterampilan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 2007, *Sosiologi Kelompok dan Masalahnya*. Jakarta : Fajar Agung
- Abdillah Hanafi, 2006, *Memasyarakatkan Ide-ide Baru Usaha Nasional* : Surabaya
- Arifin, 2006, *Sistem Administrasi Negara*, PT. Gunung Agung. Jakarta
- Entang, Howard, Sujono, 2002. *Dasar-dasar Panologi Usaha Pembaharuan Sistem Kebenaran dan Pembinaan Narapidana*. Bandung, Alumni
- Gaspers Vincent, 2008, *Ensiklopedia Administrasi*, CV. Rosdakarya. Jakarta
- Hartoyo, 2003, *Bimbingan Pemasyarakatan*, Lokakarya, Jakarta
- Raharjo, 2002. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan RI
- Moening, AD, 2002, *Perdebatan Manusia dan Organisasi Terhadap Kepegawaian*. Jakarta : Gunung Agung
- Simanjuntak, B. 2004. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung, Alumni
- Siekamto, Sejono, 2007, *Remaja dan Masalahnya*. Jakarta. Gunung Mulia
- _____, 2004. *Hukum Tata Pemerintahan*. Balai Pustaka. Jakarta
- Vredenburg, J.2006. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Dasar Hukum,*
Pancasila
Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II/B
PINRANG**

